

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.P, Parlindungan. (1989). *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*. Bandung: Mandar maju.
- Agung, I. G. ( 2005). *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badrulzaman, M. D. ( 1987). *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia*. Bandung: Citra Aditya.
- Badrulzaman, M. D. (1996). *Benda-Benda Yang Dapat Diletakka Sebagai Objek Hak Tanggungan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M. ( 2002). *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Denim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, I. G. (2012). *Teori dan Praktek Hak Tanggungan*. Semarang: LPPM Undip.
- Fuady, M. ( 2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gultom, D. M. (2005). *Cyber Law Aspek Hukum Teknoligi Informasi*. Bandung: PT Refika Aitama.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya* . Jakarta: Djambatan.
- Kashadi, P. P. (2009). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mamudji, S. S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mardalis. ( 2014). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi aksara.
- Naja, H. R. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nur, M. d. (2020). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Perangin, E. (1991). *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Putra, F. (2012). *New Public Governance*. Malang: UB Press.
- Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Salam, D. H. (2000). *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Karya Medi.
- Salim, H. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, I. K. (2019). *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Hak tanggungan: asas-asas ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan: suatu kajian mengenai undang-undang hak tanggungan*. Bandung: Alumni.

- Sofwan, S. S. (1997). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Subekti, R. (1996). *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudariato, B. H. (1996). *Konsepsi Pemikiran tentang UUHT*. Bandung: Makalah Seminar Nasional.
- Sudrajat, S. (1997). *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbit Sertifikatnya*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugeng, S. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sunarto. (2006). *Customer Service*. Jakarta: PPM.
- Taufani, S. d. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

### **Jurnal**

- Aufima, Z. (2020). Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Journal of Judicial Review*, Vol. 22(2), 8.
- Dewi, I. G. (2020). Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali). *Law, Development & Justice Review*, 3(1), 57-69.
- Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, 1.
- Imanda, N. (2020). Lahirnya hak tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan hak tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Notaire* Vol. 3(1), 151-164.

- Wiguna, I. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran hak tanggungan Secara Elektronik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 79-88.
- Natania, D. A. (2020). Penyampaian Akta Pemberian hak tanggungan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Setelah Diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan hak tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Acta Djurnal*, 3(2), 273-291.
- Nur Adhim, A. S. (2019). Problematika Pembatalan 605 Sertifikat Tanah Dalam Kawasan Otorita Batam (Studi Putusan Ptun Tanjung Pinang No: 15 / G / 2014 / PTUN-TPI). *Law, Development & Justice Review*, 2.1 , 9.
- Paputungan, N. (2016). Kajian Hukum hak tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4(2), 1.
- Sundani, T. (2017). Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. *Premise Law Journal*, 1, 3.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan hak tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

## Website

<http://www.bprbkk.co.id/>, diakses pada 22 Januari 2021.

Panduan Aplikasi Mitra Kerja Jasa Keuangan, diakses pada 22 Januari 2021.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/30/penyelenggaraansistem-elektronik-bagi-badan-publik/>, diakses pada 30 September 2020